

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik atau kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah maupun pejabat negara yang mengatasnamakan negara atau instansi yang membawahi seperti contohnya presiden, menteri, gubernur, sekjen dan lain sebagainya untuk menjalankan fungsi umum dari pemerintah atau instansi tersebut guna membangun sekaligus mengatasi permasalahan yang ada sehingga mencapai tujuan yang sudah ditentukan, hal ini biasanya dituangkan dalam bentuk aturan seperti perundang-undangan maupun putusan lainnya. (Tjokroamidjojo, 1993 : 92).

Dye (dalam Islamy, 1997 :18) menuturkan bahwa kebijaksanaan negara sebagai “*is whatever government choose to do or do not to do*” (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye menyatakan bahwasannya suatu kebijakan yang ada merupakan akibat dari adanya suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk nantinya memberikan dampak yang sebanding dengan keputusan untuk tidak bertindak. Oleh karena itu, kebijakan ini bukan sekadar pernyataan niat dari pemerintah atau pejabatnya.

Indonesia dengan kepadatan penduduknya dan dengan jumlah penduduk sebanyak 278 juta jiwa (BPS 2023), sebagian besar penduduknya dari angka tersebut memilih untuk bermukim di Pulau Jawa, sebanyak 151,6 juta jiwa masyarakat Indonesia berkumpul dan bertempat tinggal di Pulau Jawa, angka tersebut jika dikalkulasikan berarti dapat terhitung sebanyak 56,1% warga Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa dan

umumnya lebih memilih tinggal di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota besar lainnya yang serupa. DKI Jakarta saat ini adalah ibukota yang menjadi pusat kegiatan perdagangan, pemerintahan, perekonomian hingga pelayanan jasa, oleh karena itu sangat mungkin Kota Jakarta memiliki tingkat kemacetan yang tinggi jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya dikarenakan pergerakan kendaraan yang sangat besar dan mobilisasi yang cukup tinggi oleh penduduk DKI Jakarta dan sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Jakarta pun juga kian konsisten bertambah sedari tahun 2017 dimana angka jumlah kendaraan bermotor sudah mencapai 17,5 juta, hingga tahun 2021 jumlah kendaraan di Jakarta sudah mencapai 21,75 juta unit, tumbuh sebanyak 7,6% dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 juga proporsi kendaraan bermotor berbentuk mobil mencapai 18,89%, sepeda motor 75,92%, truk mencapai 3,61%, serta bus sekitar 1,57%. Masalah kemacetan seperti ini pastinya sering terjadi dan tidak hanya di Kota Jakarta, melainkan sering ditemukan pula di kota-kota besar lainnya, biasanya masalah yang serupa ini dapat dengan mudah ditemukan di beberapa ibukota provinsi di Indonesia. Oleh karena itu lalu lintas di perkotaan memerlukan strategi kebijakan publik untuk mengurai kemacetan yang terjadi.

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Menurut MKJI (1997) kemacetan yaitu kondisi yang terjadi akibat intensitas pada jalan melebihi kapasitas jalan yang direncanakan sehingga menyebabkan kecepatan bebas dalam ruas jalan tersebut mendekati 0 km/jam yang menciptakan antrian. Kemacetan

kerap terjadi di wilayah perkotaan, tidak jarang juga terjadi di kota – kota besar, khususnya di kota-kota yang belum memiliki sistem transportasi publik yang layak atau tidak memadai, serta ketika kapasitas infrastruktur jalan tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang padat.

Kemacetan di Jakarta sudah merupakan salah satu rutinitas masyarakat, terutama pada hari kerja saat jam berangkat dan pulang kerja. Waktu pagi pada pukul 7 pagi hingga 9 pagi, merupakan waktu dengan tingkat kemacetan tertinggi saat para pekerja menuju kantor. Sementara itu, pukul 5 sore hingga 7 malam, kemacetan kembali memuncak ketika masyarakat pulang kerja. Hari Senin menjadi hari dengan tingkat kemacetan paling tinggi karena merupakan awal minggu kerja. Sebanyak 68% warga Jakarta berangkat ke pusat perkantoran pada hari tersebut. Jika kondisi lalu lintas lancar, perjalanan biasanya memakan waktu sekitar 60 menit. Namun, akibat kemacetan, waktu tempuh meningkat menjadi 110 menit, sehingga terdapat tambahan waktu perjalanan selama 41 menit. Berbeda dengan hari Jumat, yang merupakan akhir pekan kerja, kemacetan di pagi hari cenderung lebih rendah. Dalam kondisi normal, waktu perjalanan tetap 60 menit, sedangkan saat macet meningkat menjadi 95 menit, sehingga waktu yang terbuang sekitar 35 menit. Sementara itu, pada perjalanan pulang kerja hari Senin, tanpa kemacetan waktu tempuh normal adalah 60 menit, namun bisa meningkat menjadi 119 menit akibat kemacetan, sehingga ada tambahan waktu perjalanan sebanyak 59 menit. Sedangkan pada Jumat sore, kemacetan tidak sepadat hari Senin. Jika lalu lintas lancar, perjalanan memakan waktu 60 menit, sedangkan saat macet bisa mencapai 100 menit, dengan selisih waktu 40 menit. Berdasarkan analisis kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman, nilai Traffic

Index pada sore hari mencapai 51%, sedangkan pada siang hari hanya 21%. Rata-rata waktu tempuh perjalanan di sore hari adalah 6 menit 50 detik, sementara pada siang hari lebih singkat, yakni 6 menit 23 detik.

Dalam pembahasan ini, DKI Jakarta sendiri sudah menerapkan banyak cara melalui keputusan yang sudah sering diubah untuk mengatasi permasalahan kemacetan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan pembatasan kendaraan yang diawali dengan kebijakan *Three in One* hingga kebijakan Ganjil-Genap yang hingga saat ini masih diterapkan. Kebijakan pertama dibuat dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 4104 Tahun 2003, yang setelah itu diubah Kembali dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2012 yang membahas mengenai pengendalian kawasan lalu lintas. Tetapi nyatanya, pemecahan masalah yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pemecahan masalah kemacetan ini belum memiliki *impact* yang signifikan untuk mengurangi kemacetan di Jalan tersebut, bahkan justru dengan kebijakan ini ternyata hanya membuat suatu masalah baru yang mengakibatkan kebijakan *three in one* harus diganti dengan sesuatu yang lebih memadai, seperti contoh, adanya joki *three in one* yang dilahirkan karena kebijakan ini hingga ancaman kejahatan terhadap anak dibawah umur yang diperlakukan sebagai joki menjadi beberapa alasan mengapa kebijakan ini dipandang hanya membuat masalah baru.

Setelah *three in one* dihapus, Anies Baswedan yang kala itu berperan sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama wakilnya, Sandiaga Uno, merumuskan kebijakan baru sebagai pembaruan dari kebijakan sebelumnya yang telah diuji coba secara bertahap pada masa pemerintahan sebelumnya. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi atas persoalan

kemacetan yang belum terselesaikan. Sebelumnya, kebijakan tersebut pertama kali digagas oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lalu diteruskan implementasinya melalui kebijakan lanjutan yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Kebijakan ini dikenal dengan sistem ganjil-genap. Sebagai kepala daerah, Anies Baswedan memiliki tanggung jawab untuk memastikan implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan efektif. Untuk itu, ia menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan ganjil-genap. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan sistem ganjil-genap sebagai bentuk pembaruan dari kebijakan sebelumnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi manajemen lalu lintas yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2016. Seiring waktu, kebijakan ini mengalami beberapa pembaruan, misalnya saat pelaksanaan Asian Games di Jakarta dan Palembang, yang diatur dalam Pergub Nomor 155 Tahun 2018, kemudian diperpanjang melalui Pergub Nomor 88 Tahun 2019. Pada tahun 2020, saat pandemi Covid-19 melanda, kebijakan ini kembali diperbarui melalui Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2020.

Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut dengan segala perubahan dan pencocokannya, pastinya hal tersebut dilakukan oleh pemerintahan demi kenyamanan para pengguna jalan di DKI Jakarta, karena bagaimanapun juga kebijakan ini dibuat untuk melayani publik, untuk itu penulis penelitian ini ingin melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut yang diterapkan di Jalan Jenderal Sudirman sekaligus untuk mengetahui apakah kebijakan ini pantas untuk dilanjutkan, diberhentikan atau harus dilakukan pengembangan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan.

Menurut Subarsono (2005:119), suatu yang dinamakan dengan evaluasi kebijakan merupakan upaya guna mengukur seberapa efektif sebuah kebijakan untuk mencapai kinerjanya. Sementara itu, Leo Agustino dalam buku “*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*” menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kegagalan parsial dari kebijakan tersebut, serta untuk menilai apakah perumusan dan pelaksanaannya telah mampu menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebelumnya atau tidak (Leo, 2006:186).

William N. Dunn mengartikan evaluasi sebagai proses yang secara umum sepadan dengan penaksiran (appraisal), pemberian peringkat (rating), dan penilaian (assessment), yang semuanya bertujuan untuk menganalisis hasil dari suatu kebijakan dalam bentuk nilai. Secara lebih khusus, evaluasi fokus pada penyediaan informasi mengenai seberapa besar nilai atau manfaat dari hasil kebijakan tersebut (Dunn, 2003:608). Kedua definisi ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan tahapan yang menilai pencapaian suatu kebijakan berdasarkan nilai dari hasil atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, evaluasi merupakan bagian akhir dari proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini secara spesifik memilih Jalan Jenderal Sudirman sebagai objek kajian karena jalan ini merupakan salah satu ruas jalan utama dan tersibuk di Jakarta, serta berada pada pusat aktivitas kota yang mencakup pusat perekonomian, perkantoran, hiburan, dan transportasi. Jalan ini juga merupakan jalur strategis yang dilalui oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Jakarta dan sekitarnya, sehingga menjadi lokasi yang paling relevan dalam mengevaluasi dampak implementasi kebijakan ganjil-genap.

Dengan tingginya intensitas kendaraan yang melintas, Jalan Jenderal Sudirman menjadi indikator yang representatif untuk mengukur keberhasilan kebijakan dalam mengatasi kemacetan.

Akan tetapi, penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pengumpulan data sekunder tahun 2024 yang disebabkan oleh waktu penyusunan skripsi ini yang dilakukan di awal tahun 2024, ketika data-data resmi, seperti laporan tahunan dari instansi pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), atau evaluasi terbaru dari Dinas Perhubungan, belum tersedia secara menyeluruh dan terpublikasi secara luas. Oleh karena itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mengandalkan kombinasi dari data tahunan sebelumnya serta data parsial dan sementara dari tahun 2024 yang diperoleh melalui dokumentasi media, situs resmi instansi, serta informasi dari wawancara langsung dengan narasumber. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi validitas penelitian, karena pendekatan kualitatif yang digunakan tetap mampu menggambarkan kondisi implementasi kebijakan secara mendalam melalui persepsi aktor dan masyarakat yang terlibat langsung di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

Apakah kebijakan ganjil-genap efektif, efisien dan tepat untuk mengatasi kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk dapat mendeskripsikan efektivitas, efisiensi dan ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan Ganjil-Genap di Jalan Jenderal Sudirman dalam mengatasi kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan dalam bidang kebijakan publik dan teknik analisis kebijakan khususnya kebijakan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemacetan di DKI Jakarta.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan transportasi kedepannya serta dapat memberikan informasi bagi masyarakat bahwa suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang diinginkan dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dapat tercapai.

1.5 Penelitian Terdahulu

Heni Ratnaningtyas dkk. (2022) telah melakukan penelitian mengenai bagaimana perjalanan wisatawan domestik maupun mancanegara ke Jakarta dengan mempertimbangkan faktor kemacetan lalu lintas. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode wawancara mendalam dengan wisatawan yang berkunjung ke

berbagai destinasi wisata di Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan beberapa upaya dalam mengatasi kemacetan, di antaranya: (1) Mengeluarkan kebijakan pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi; (2) Menerapkan sistem jalan berbayar; (3) Mengembangkan sistem transportasi umum yang terintegrasi; (4) Membangun lebih banyak flyover dan underpass; serta (5) Melakukan revitalisasi trotoar dan fasilitas pejalan kaki. Selain upaya dari pemerintah, wisatawan juga memiliki strategi untuk tetap menikmati perjalanan wisata di Jakarta meskipun menghadapi kemacetan, seperti: (1) Berkunjung pada hari libur atau saat perayaan Idul Fitri; (2) Menghindari perjalanan pada jam sibuk berangkat dan pulang kerja; (3) Menghindari rute yang sering mengalami kemacetan; (4) Menggunakan transportasi umum; serta (5) Memanfaatkan aplikasi pemantau lalu lintas seperti Twitter, Waze, atau Google Maps untuk mengetahui kondisi jalan sebelum bepergian.

Ana Ramadhayanti (2020) juga melakukan penelitian mengenai kemacetan di Jakarta yang kaitannya dengan pengaruh dampak antusias dari masyarakat dalam menggunakan *Mass Rapid Transit* (MRT). Dalam penelitian ini, disebutkan bahwasannya kehadiran MRT ini harus didukung dengan antusias Masyarakat dengan cara menggunakan MRT. Salah satu dukungan tersebut adalah dengan meninggalkan kendaraan pribadi lalu beralih ke kendaraan umum atau transportasi umum. Dengan adanya pembuatan MRT ini, pastinya merubah tata ruang kota, seperti dibangunnya jembatan layang dan lainnya. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ana Ramadhayanti ini juga membuahkan hasil bahwasannya antusias dari Masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kemacetan di DKI Jakarta.

Dalam penelitian ini, penulis juga menuturkan harapannya supaya dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat berpartisipasi mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemacetan.

Dalam pembahasan kemacetan di Jakarta ini, pun juga Rohana Sitanggang (2018) melakukan penelitian mengenai factor – factor yang menyebabkan kemacetan di DKI Jakarta. Penulis menuturkan bahwasannya DKI Jakarta sebagai ibu kota mempunyai intensitas aktivitas yang sangat padat, karena menjadi pusat aktivitas tidak hanya dari masyarakat adatnya, namun juga warga wilayah sekitarnya seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor, sehingga diperlukannya sistem transportasi yang terintegrasi pula dengan seluruh wilayah yang terkait. Rohana Sitanggang melakukan penelitian ini dengan cara purposive sampling dan quote sampling dari 30 responded yang berasal dari pengguna jalan dan masyarakat sekitar Jalan Cawang – Grogol dan Kota Tua – Harmoni, yang mengeluarkan adanya hasil 3 urutan factor peringkat teratas penyebab kemacetan di DKI Jakarta, yaitu: (1) Penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta yang cukup tinggi; (2) Penggunaan sepeda motor roda dua di Jakarta sangat tinggi dan; (3) Volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada.

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dicantumkan, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Evaluasi dari Kebijakan Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, dengan menggunakan kriteria evaluasi menurut William N. Dunn, antara lain adalah: Efektifitas, Kebijakan, Efisiensi dalam pelaksanaan

Kebijakan, Kecukupan terhadap kebutuhan; Perataan Dalam Pelaksanaan kebijakan; Responsivitas; Ketepatan Program.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan pemerintah atau kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah maupun negara untuk menjalankan fungsinya, dalam rangka memecahkan suatu permasalahan maupun adanya target dan tujuan yang ingin dicapai. (Tjokroamidjojo, 1993 : 92).

Dye (dalam Islamy, 1997 :18) juga menuturkan bahwasannya kebijaksanaan negara sebagai *“is whatever government choose to do or do not to do”*. Hal ini menunjukkan bahwa suatu keputusan disebabkan karena apa yang dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah sehingga. Disamping itu, suatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun juga dapat termasuk sebagai kebijaksanaan negara.

kebijakan publik singkatnya dapat disimpulkan sebagai suatu hal yang menjadi tindakan yang dilakukan maupun tidak oleh pemerintah yang ingin mencapai pada tujuan tertentu supaya dapat memecahkan masalah publik atau untuk suatu kepentingan yang dimiliki oleh publik jika mengacu pada apa yang disampaikan oleh para ahli tersebut.

1.6.1.1 Tahapan Kebijakan Publik

Proses perumusan kebijakan publik merupakan suatu tahapan yang kompleks karena melibatkan berbagai proses dan variabel yang perlu dianalisis secara mendalam.

Menurut William Dunn, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno (2007: 32-34), kebijakan publik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tahap. Pembagian tahapan ini bertujuan untuk mempermudah dalam memahami dan menganalisis kebijakan publik. Namun, perlu dicatat bahwa setiap ahli mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengurutkan tahapan-tahapan tersebut. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

a) Tahap penyusunan agenda

Pada tahap penyusunan agenda dalam proses kebijakan publik, tidak semua permasalahan langsung mendapatkan perhatian. Beberapa isu mungkin tidak dibahas sama sekali, sementara yang lain justru dijadikan prioritas utama. Selain itu, terdapat pula permasalahan yang ditunda pembahasannya untuk jangka waktu tertentu karena alasan tertentu sebelum akhirnya masuk ke dalam agenda kebijakan para pembuat keputusan.

b) Tahap formulasi kebijakan

Setelah suatu masalah masuk ke dalam agenda kebijakan, tahap selanjutnya adalah pembahasan oleh para pembuat kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan ini, berbagai aktor terlibat dalam persaingan untuk mengajukan solusi terbaik guna menyelesaikan permasalahan yang ada. Proses ini melibatkan pemilihan di antara berbagai alternatif kebijakan (policy alternatives/policy options) yang tersedia. Setiap alternatif akan bersaing agar dapat terpilih sebagai kebijakan yang diadopsi guna mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari berbagai alternatif kebijakan yang diajukan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif dipilih untuk diadopsi. Keputusan ini biasanya didasarkan pada dukungan mayoritas di lembaga legislatif, kesepakatan di tingkat pimpinan lembaga, atau putusan yang ditetapkan oleh peradilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Sebuah program kebijakan tidak akan memiliki dampak nyata jika tidak diimplementasikan secara efektif. Implementasi kebijakan melibatkan pelaksanaannya oleh badan administrasi maupun agen pemerintah di tingkat operasional. Dalam proses ini, berbagai kepentingan dapat saling bersaing, sementara dukungan dari legislatif, kesepakatan antar pemimpin lembaga, atau keputusan peradilan sering kali berperan dalam kelancaran pelaksanaannya.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap evaluasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan yang telah dijalankan akan dianalisis untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Untuk itu, diperlukan indikator atau kriteria tertentu sebagai dasar penilaian guna menentukan apakah kebijakan yang telah diterapkan telah memberikan dampak yang diinginkan atau masih perlu perbaikan.

1.6.2 Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang berkaitan dengan penilaian terhadap kebijakan, termasuk aspek substansi, implementasi, dan dampaknya

(Anderson, 1975). Evaluasi ini dianggap sebagai bagian yang bersifat fungsional dalam kebijakan, yang berarti bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan setelah kebijakan berjalan, namun juga terhitung dengan seluruh tahapan dalam proses kebijakan. W. Dunn menjelaskan bahwa evaluasi memiliki makna yang berkaitan dengan penerapan standar nilai terhadap hasil suatu kebijakan atau program. Evaluasi dalam kebijakan melibatkan beberapa elemen, seperti menarik kesimpulan, memberikan klarifikasi, melakukan kritik, melakukan penyesuaian, serta menyusun kembali permasalahan.

Dalam analisis kebijakan, evaluasi memiliki beberapa peran utama. Peran pertama dan yang paling esensial adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai, serta peluang telah dapat terpenuhi melalui intervensi kebijakan publik. Evaluasi juga menunjukkan sejauh mana tujuan serta target kebijakan telah tercapai. Kedua, evaluasi membantu dalam mengklarifikasi serta mengkritisi nilai-nilai yang mendasari penetapan tujuan dan sasaran kebijakan. Nilai-nilai tersebut diperjelas melalui pendefinisian dan penerapan tujuan kebijakan, serta dikritisi dengan mempertanyakan relevansi dan kelayakan tujuan tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Ketiga, evaluasi berkontribusi terhadap penerapan metode analisis kebijakan lainnya, seperti dalam perumusan masalah serta rekomendasi kebijakan. Jika ditemukan bahwa kinerja suatu kebijakan tidak sesuai dengan harapan, maka evaluasi dapat membantu dalam merumuskan kembali masalah kebijakan. Selain itu, evaluasi juga dapat mendukung pengembangan alternatif kebijakan baru atau merevisi kebijakan yang telah ada, terutama

jika kebijakan sebelumnya dianggap kurang efektif dan perlu digantikan dengan alternatif yang lebih tepat (Bardach, 2008).

Menurut William Dunn (1998: 608-609), evaluasi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan metode-metode analisis kebijakan yang lainnya. Karakteristik yang membedakan ini terbagi menjadi empat yaitu sebagai berikut.

1) Fokus Nilai

Evaluasi merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.

2) Interdependensi Fakta Nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau terendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan prospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.

4) Dualitas Nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

1.6.2.1 Tahapan Evaluasi Kebijakan

Sudut pandang dari para evaluator yang akan mengevaluasi suatu kebijakan memiliki tujuan atau sudut pandangnya tersendiri, sehingga evaluasi kebijakan publik memiliki pendekatan yang beragam. Menurut Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yaitu :

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), tahapan evaluasi ini dilakukan sebelum dibuat rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, bertujuan untuk memperhitungkan skala prioritas dari banyaknya alternatif;

2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), tahap ini dilakukan pada saat rencana pembangunan sedang dilaksanakan dan bertujuan membuat penentuan tingkatan kemajuan rencana yang sudah ada dengan yang ditentukan sebelumnya;
3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), pada tahap evaluasi ini, evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan Pembangunan sudah berakhir dilaksanakan, sehingga arah yang diharapkan adalah untuk dapat melihat pencapaian program dalam mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) atau ketepatan (dampak terhadap kebutuhan) program.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berfokus kepada evaluasi di tahap pasca-pelaksanaan (ex-post), hal ini dilakukan peneliti dikarenakan peraturan atau regulasi yang ditetapkan sudah ditetapkan selama 5 tahun lebih sehingga perlu diadakannya suatu evaluasi mengenai kebijakan tersebut.

William N. Dunn dalam Sudiro (2018:63) membahas bahwasannya dari istilah evaluasi kebijakan ini pada dasarnya dapat disamakan dengan suatu penafsiran, penilaian dan pemberian angka. Jika kasusnya adalah suatu kebijakan, maka nilai evaluasi adalah semua hal yang mengenai nilai dan manfaat dari suatu hasil kebijakan, singkatnya dalam suatu evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kinerja suatu kebijakan. Lebih jelas Dunn mengatakan bahwa evaluasi memberikan sumbangan pemikiran terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada umumnya sebuah nilai dapat dikritik dengan menanyakan secara

mendalam sebuah kesiapan tujuan dan target. Menurut William N. Dunn ada 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, ketepatan.

Lebih jelasnya pada penelitian ini, evaluasi kebijakan ganjil-genap yang dituliskan oleh peneliti hanya menggunakan 3 nilai indikator dari 6 nilai indikator pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya dengan alasan dan perhitungan yang sudah dilakukan, antara lain:

1. Relevansi dengan Tujuan Evaluasi dan Keterkaitan dengan Pergub No. 76 Tahun 2020
 - a. **Efektivitas** dipilih sebagai salah satu indikator utama karena menjadi tolok ukur sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu mengurangi kemacetan di Jakarta. Sejalan dengan hal tersebut, Pergub No. 76 Tahun 2020—sebagai pengembangan dari Pergub No. 88 Tahun 2019 dan Pergub No. 155 Tahun 2018—menekankan pentingnya pencapaian hasil yang nyata dan terukur. Kebijakan yang berhasil dinilai tidak hanya dari penurunan volume kendaraan dan peningkatan kelancaran lalu lintas, tetapi juga dari dampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, sehingga indikator efektivitas menjadi sangat relevan dalam mengukur kesuksesan implementasi kebijakan ini.
 - b. **Efisiensi** Indikator efisiensi digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan ini memberikan hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang ada, seperti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur. Dalam konteks Pergub

No. 76 Tahun 2020, yang merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, penekanan pada efisiensi mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pengeluaran dan upaya operasional demi memperoleh manfaat maksimal. Evaluasi kebijakan yang menitikberatkan pada efisiensi membantu memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara produktif, serta menunjukkan bahwa pengalokasian dana dan tenaga telah dilakukan secara tepat guna dalam upaya mengatasi permasalahan kemacetan.

- c. **Ketepatan** Indikator ketepatan sangat penting untuk mengukur kesesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan kebutuhan nyata pengguna jalan serta karakteristik permasalahan kemacetan di Jakarta. Pergub No. 76 Tahun 2020, yang merupakan lanjutan dan pengembangan dari Pergub No. 88 Tahun 2019 dan Pergub No. 155 Tahun 2018, menggarisbawahi pentingnya penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, ketepatan tidak hanya menjadi ukuran teknis, melainkan juga mencerminkan sensitivitas kebijakan terhadap konteks sosial, ekonomi, dan geografis di Jakarta. Evaluasi berbasis ketepatan memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna jalan dan mampu mereduksi permasalahan kemacetan secara efektif.

2. Pertimbangan Indikator Lainnya yang Tidak Dapat Digunakan

- a. **Keadilan** Meskipun prinsip keadilan sangat penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik, dalam konteks evaluasi pengurangan kemacetan di Jakarta,

indikator keadilan dianggap kurang memberikan gambaran langsung mengenai pencapaian tujuan utama. Fokus utama evaluasi adalah pada dampak operasional—seperti penurunan kemacetan dan peningkatan mobilitas—yang lebih terukur melalui indikator efektivitas, efisiensi, dan ketepatan. Isu keadilan dapat menjadi bagian dari kajian kebijakan yang lebih luas, namun dalam rangka mencapai target spesifik pengurangan kemacetan, aspek ini dinilai sebagai parameter tambahan yang kurang prioritas.

- b. **Responsivitas** mengukur seberapa cepat dan tepat kebijakan dalam merespons perubahan situasi atau kebutuhan pengguna jalan. Meskipun penting, indikator ini dalam konteks evaluasi Pergub No. 76 Tahun 2020 dianggap memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan tidak secara langsung mengukur pencapaian tujuan utama dalam mengatasi kemacetan. Evaluasi dengan indikator efektivitas, efisiensi, dan ketepatan memberikan penilaian yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan kebijakan dalam menghadapi permasalahan kemacetan secara keseluruhan, sehingga responsivitas tidak menjadi prioritas utama dalam kerangka evaluasi ini.
- c. **Perataan** Indikator perataan berkaitan dengan distribusi manfaat kebijakan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks pengurangan kemacetan, meskipun perataan merupakan nilai penting, fokus utama regulasi seperti Pergub No. 76 Tahun 2020 lebih menitikberatkan pada peningkatan kinerja sistem transportasi dan kelancaran arus lalu lintas. Dengan demikian, perataan dilihat sebagai indikator yang memiliki

keterkaitan tidak langsung dengan pencapaian hasil operasional utama. Pemilihan indikator efektivitas, efisiensi, dan ketepatan lebih tepat untuk memberikan penilaian yang konkrit dan terukur mengenai dampak kebijakan terhadap permasalahan kemacetan.

3. Konteks Penelitian yang Spesifik

- a. Evaluasi kebijakan dalam penelitian ini berfokus pada aspek yang paling relevan dengan tujuan penelitian, yaitu mengukur efektivitas, efisiensi, dan ketepatan kebijakan dalam mengatasi kemacetan.
- b. Indikator lain seperti keadilan (equity), responsivitas (responsiveness), dan ketepatan program (appropriateness) lebih cocok digunakan dalam evaluasi kebijakan yang berdampak luas terhadap kelompok sosial tertentu, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada kinerja kebijakan dalam lalu lintas perkotaan.

4. Keterbatasan Data dan Fokus Evaluasi

- a. Tidak semua indikator dalam teori Dunn memiliki data yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dalam konteks kebijakan ganjil-genap.
- b. Beberapa indikator seperti keadilan dan responsivitas membutuhkan penelitian yang lebih luas terkait dampaknya terhadap berbagai kelompok masyarakat, sementara penelitian ini lebih terfokus pada pengaruh kebijakan terhadap lalu lintas dan efektivitas implementasinya.

Pemilihan tiga indikator—efektivitas, efisiensi, dan ketepatan—berdasarkan relevansi langsungnya dengan tujuan utama pengurangan kemacetan, sejalan dengan arah

pengembangan kebijakan yang tercermin dalam Pergub No. 76 Tahun 2020. Sementara itu, indikator keadilan, responsivitas, dan pemerataan, meskipun penting dalam konteks kebijakan publik secara umum, tidak diprioritaskan karena kurang memberikan ukuran langsung terhadap pencapaian target operasional utama. Evaluasi dengan pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan penilaian yang lebih fokus, terukur, dan relevan dengan kebutuhan peningkatan mobilitas dan pengelolaan kemacetan di Jakarta.

Agar lebih sistematis, ketiga indikator ini dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Indikator Evaluasi Kebijakan oleh William Dunn

No.	Indikator Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn	Penjelasan Indikator
1.	Efektivitas	Kriteria ini berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Efektivitas menilai apakah kebijakan tersebut berhasil mengatasi masalah yang ingin diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
2.	Efisiensi	Kriteria ini menilai hubungan antara input (sumber daya yang digunakan) dan output (hasil yang diperoleh) dalam pelaksanaan kebijakan. Efisiensi mengukur apakah kebijakan tersebut menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal, sehingga

		memastikan bahwa dana, waktu, dan tenaga yang digunakan sebanding dengan hasil yang dicapai.
3.	Ketepatan	Kriteria ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan, nilai, atau preferensi masyarakat yang dituju. Ketepatan menilai relevansi kebijakan terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik masyarakat.

Sumber: William Dunn, Tahap – Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indikator **efektivitas** mengukur pencapaian hasil yang diinginkan dengan benar, sementara **efisiensi** menunjukan seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut, serta indikator **ketepatan** berfokus pada pertanyaan mengenai efek yang dirasakan oleh masyarakat luas atau unit yang tidak terpengaruh oleh kebijakan yang diterapkan

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.2 Indikator dan Penilaian

No.	Indikator Evaluasi Kebijakan	Indikator Penilaian	Indikator Pertanyaan Penelitian
1.	Efektivitas	Efektivitas mengukur sejauh mana hasil yang dicapai oleh kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Fokus dalam indikator ini adalah pada outcome kebijakan . Dalam konteks penelitian ini, pengukuran efektivitas dilakukan dalam menilai sejauh mana kebijakan ganjil-genap dapat mengurangi kemacetan di ruas Jalan Jenderal Sudirman.	a. Apakah kemacetan dapat terurai setelah diberlakukannya kebijakan ganjil-genap; b. Bagaimana Kebijakan ganjil-genap ditransformasikan dalam bentuk program langsung kepada masyarakat; c. Apakah ada Faktor pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan ganjil-genap.
2.	Efisiensi	Efisiensi mengukur hubungan antara sumber daya yang digunakan (input) dengan hasil yang diperoleh (output). Kriteria ini menilai apakah kebijakan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang	a. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam penerapan kebijakan ganjil-genap; b. Berapa anggaran yang diperlukan untuk

		minimal. Dalam konteks penelitian ini, pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengetahui berapa banyak anggaran yang diperlukan dan berapa banyak tenaga kerja serta sumber daya dukungan lainnya untuk mencapai tujuan dari kebijakan ganjil-genap tersebut.	melaksanakan kebijakan ganjil-genap; c. Adakah faktor pendukung lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan ganjil-genap.
3.	Ketepatan	Ketepatan atau <i>appropriateness</i> mengukur sejauh mana kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau relevan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kriteria ini berfokus pada relevansi kebijakan terhadap konteksnya. Dalam konteks penelitian ini, pengukuran ketepatan atau <i>appropriateness</i> diukur dengan menilai apakah pembatasan kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman relevan untuk mengurangi kemacetan dan apakah jadwal pelaksanaannya sesuai dengan pola lalu lintas masyarakat.	a. Hasil dari kebijakan ganjil-genap tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pemerintah; b. Tingkat kesesuaian dari jadwal dan wilayah penerapan ganjil genap.

Sumber: William Dunn, Tahap – Tahap Evaluasi Kebijakan

1.7.1 Perbedaan Utama Pengukuran

1. Efektivitas: Apakah kebijakan mencapai tujuannya?
2. Efisiensi: Apakah tujuan tercapai dengan penggunaan sumber daya minimal?
3. Ketepatan: Apakah kebijakan relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang dituju?

Ketiga kriteria ini saling melengkapi untuk memberikan penilaian yang menyeluruh tentang kinerja kebijakan publik, khususnya kebijakan ganjil-genap.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Moleong (2009: 4) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam ilmu sosial yang berfokus pada kajian terhadap budaya. Pendekatan ini pada dasarnya didasarkan pada pengamatan terhadap manusia, baik dalam lingkungan tempat mereka berada maupun dalam konteks sosial yang melingkupinya. Secara mendasar, penelitian kualitatif sangat bergantung pada observasi terhadap manusia dalam lingkup kehidupannya serta dalam penggunaan istilah-istilah sosial yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan suatu penelitian kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang

digunakan. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010).

1.8.2 Situs dan Subjek Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan juga sebagai situs penelitian merupakan suatu lokasi persoalan dari suatu penelitian tersebut terjadi. Lokasi penelitian ini bertempat di salah satu ruas jalan DKI Jakarta yakni Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Subjek pada penelitian ini memfokuskan kepada informan yang dapat memberikan suatu informasi serta penjelasan maupun pandangan terhadap hal yang akan diteliti, dalam riset ini, peneliti mengkategorikan 2 subjek terkait pemilihan informan, yaitu dari pemerintah selaku pembuat kebijakan Ganjil-Genap yakni Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang berada dibawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersamaan dengan Polri, serta tidak lupa juga masyarakat yang termasuk dalam lingkungan suatu kebijakan ini dibuat.

Tabel 1.3 Subjek Penelitian

Pelaksana/Regulator	1. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Direktorat Lalu Lintas 2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
Sasaran	1. Masyarakat

1.8.3 Jenis dan Sumber Data

1.8.3.1 Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, baik dari individu atau perseorangan melalui wawancara dengan informan maupun dari hasil observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan, pada konteks penelitian ini, pihak-pihak tersebut adalah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai regulator kebijakan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai pengawas dari kebijakan dan juga kepada masyarakat pengguna ruas Jalan Jenderal Sudirman.

1.8.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terkait dengan suatu peristiwa-peristiwa yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, laporan hasil penelitian, artikel-artikel, serta bentuk-bentuk yang dapat memberikan informasi secara mendalam.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

1.8.4.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon, email, atau *video call* melalui *Zoom* atau *Skype*. Dengan Teknik ini,

penulis dapat memberikan keterangan maupun pandangan dari informan yang nantinya akan diwawancari.

1.8.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung objek penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi serta menarik kesimpulan terkait makna, perspektif narasumber, kejadian, peristiwa, maupun proses yang diamati. Dokumentasi yang dimaksud ini juga dapat berupa tulisan yang sudah ditulis oleh orang lain, jurnal penelitian lain, artikel, serta dokumen – dokumen tertulis yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan bila data empiris yang diperoleh merupakan kumpulan kata-kata, bukan daftar angka, dan tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori atau struktur klasifikasi. Data biasanya terdiri dari teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat analisis hulu (dengan mencatat, mengetik, mengedit, atau menulis) sebelum digunakan. Analisis kualitatif masih menggunakan kata-kata, ini biasanya terdiri dari teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat analisis.

Dengan ini dapat diartikan bahwasannya analisis data pada penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada penelitian. Peneliti menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis data melibatkan tiga proses utama

yang berlangsung secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga proses ini saling berkaitan dan membentuk siklus interaktif yang terjadi sebelum, selama, dan setelah proses pengumpulan data. Hubungan yang erat di antara ketiga komponen ini menciptakan suatu keseluruhan yang membangun pemahaman umum terhadap data yang dianalisis, yang kemudian disebut sebagai "analisis" (Ulber Silalahi, 2009: 339).

1.8.5.1 Reduksi Data

Dalam tahap ini, teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan cara mengklasifikasi, pensederhanaan, dan pemfokusan data-data penting yang telah diperoleh oleh peneliti di lapangan. Tahap ini dapat membantu penyederhanaan suatu data kualitatif dengan selektif dan mengubah menjadi kumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data baik data primer hasil observasi dan wawancara serta data sekunder dari hasil dokumentasi.

1.8.5.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang dapat diambil kesimpulan dan tindakannya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya berbentuk teks naratif. Penyajian data dimaksudkan untuk membantu peneliti memahami data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan data tentang praktik penerapan kebijakan Ganjil-Genap di ruas Jalan Jenderal Sudirman DKI Jakarta dan juga memahami faktor pendukung maupun penghambat diterapkannya kebijakan ini.

1.8.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dari analisis data adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini pastinya harus didukung oleh data atau bukti yang valid. Pada tahapan ini adalah perwakilan dari inti atau tema utama penelitian yang dilakukan dan biasanya disertai dengan pendapat dari peneliti itu sendiri. Kesimpulan hendaknya diambil sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Sebagai bagian dari penelitian, peneliti menarik kesimpulan dari topik mengenai evaluasi kebijakan Ganjil-Genap di ruas Jalan Jenderal Sudirman DKI Jakarta.

1.8.6 Instrumen Penelitian

Tabel 1.4 Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian	Keterangan
Wawancara	Wawancara dilakukan dengan berbagai narasumber, termasuk pengemudi, petugas Dinas Perhubungan, dan ahli transportasi. Berikut adalah pertanyaan yang dapat diajukan: 1. Efektifitas a. Sejauh mana Anda merasa peraturan ganjil genap berhasil mengurangi kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman? b. Apa indikator yang Anda gunakan untuk menilai efektivitas peraturan ini?

	c. Apakah ada perubahan signifikan dalam waktu tempuh perjalanan setelah penerapan peraturan ini? d. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peraturan ganjil genap ini? e. Apakah Anda melihat adanya pengaruh positif terhadap kualitas udara setelah penerapan peraturan ini? 2. Efisiensi a. Bagaimana Anda menilai penggunaan sumber daya dalam penerapan peraturan ganjil genap ini? b. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk implementasi peraturan ini sebanding dengan hasil yang dicapai? c. Seberapa cepat proses sosialisasi dan penegakan hukum terkait peraturan ini dilakukan? d. Apakah ada kendala yang menghambat efisiensi dalam pelaksanaan peraturan ganjil genap? e. Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi diterapkan untuk
--	---

	memastikan efisiensi kebijakan ini? 3. Ketepatan a. Apakah peraturan ganjil genap diterapkan pada waktu dan lokasi yang tepat menurut Anda? b. Seberapa relevan tujuan dari peraturan ini dengan masalah kemacetan yang ada di Jakarta? c. Bagaimana Anda menilai asumsi dasar yang mendasari penerapan peraturan ganjil genap ini? d. Apakah ada alternatif lain yang lebih tepat daripada peraturan ganjil genap untuk mengatasi kemacetan? e. Seberapa baik komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjelaskan tujuan dan manfaat dari peraturan ini?
Dokumentasi	Pengumpulan data melalui dokumentasi meliputi studi literatur mengenai kebijakan ganjil genap.